

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING  
NATAL NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG  
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA SAMPURAGA DI DESA  
SIRAMBAS**

**SKRIPSI**

Oleh :

**AINUN SERIDAH**

**NPM 1803100010**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**

**BERITA ACARA PENGESAHAN**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : AINUN SERIDAH  
NPM : 1803100010  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari,tanggal : Rabu, 21 September 2022  
Waktu : 08.30 s.d Selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si**

PENGUJI II : **AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si**

PENGUJI III : **SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

**Dr. ARIFIN SALEH,S.Sos.,M.SP**

**Dr. ABRAR ADHANI,S.Sos.,M.I.Kom**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : AINUN SERIDAH

NPM : 1803100010

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI  
MANDAILING NATAL NOMOR. 55 TAHUN  
2016 TENTANG PENGEMBANGAN OBJEK  
WISATA SAMPURAGA DI DESA SI RAMBAS

Medan, 26 September 2022

PEMBIMBING

  
SYA FERUDDIN, S.Sos., M.H

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

  
ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN

  
Dr. ARIFF SALEH, S.Sos., M.SP



Unggul | Terpercaya

## SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, AINUN SERIDAH NPM 1803100010 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 26 September 2022

Yang Menyatakan



AINUN SERIDAH  
1803100010

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PENGEMBANGAN OBJEK WISATA SAMPURAGA DI DESA SIRAMBAS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peranan pemerintah Mandailing Natal dalam pengembangan objek wisata sampuraga, kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam pengembangan objek wisata Sampuraga dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan objek wisata Sampuraga. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian ini terdiri dari informan kunci (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Mandailing natal dan Kepala Desa Sirambas) dan informan selanjutnya (pengunjung Pariwisata Sampuraga). Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara, dan studi dokumentasi dan selanjutnya dilakukan teknik analisis uji keabsahan data yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik drajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Peranan pemerintah Mandailing Natal dalam pengembangan objek wisata Sampuraga yang terdapat pada Pasal 8 Ayat 1 belum maksimal. Peranan pemerintah Mandailing Natal dalam pengembangan objek wisata Sampuraga baru berupa: (1). Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan prasarana dan sarana pariwisata sampuraga, (2). Melakukan promosi pariwisata, (3). Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan pariwisata sampuraga, (4). Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pariwisata, (5). Mengikutsertakan masyarakat dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata Sampuraga pemerintah Mandailing Natal menghadapi kendala, yaitu kendala internal dan eksternal. Untuk mengatasi kendala dalam pengembangan objek wisata Sampuraga pemerintah Mandailing Natal melakukan upaya: (1). Penyediaan prasarana dan sarana pariwisata, (2). Melakukan promosi pariwisata, (3). Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pariwisata, (4). Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Untuk tahun-tahun mendatang diharapkan peranan dan perhatian pemerintah Mandailing Natal dalam pengembangan objek wisata Sampuraga semakin meningkat dan bersama-sama masyarakat membangun, mengembangkan dan mengelola objek wisata Sampuraga.

**Kata Kunci : Implementasi, Pengembangan dan Objek Wisata**

## **ABSTRACT**

This study aims to find out about the role of the Mandailing Natal government in developing Sampuraga tourism objects, the obstacles faced by the Mandailing Natal Regency government in developing Sampuraga tourism objects and to find out the efforts made by the Mandailing Natal Regency government to overcome obstacles in developing tourist attractions Sampuraga. This type of research is a qualitative research using descriptive method. The informants of this study consisted of key informants (Head of the Regional tourism and Culture Office of Mandailing Natal and the Head of Sirambas Village) and subsequent informants (communities around Sirambas and visitors to Sampuraga Touris). Data collection is done by observation, interviews, and then the data wetness test analysis technique is carried out, namely by using the source triangulation technique, which is to compare and check back the degree of trustworthiness of information obtained through time and different tools in qualitative methods. Based on the results of the research, it can be concluded: Natal government of the Sampuraga tourism object has not been maximized, the role of the Mandailing Natal government in the new Sampuraga tourism object is: (1). Development, repair, maintenance of infrastructure and facilities for tourism in Sampuraga, (2). Promoting tourism, (3). Cooperating with the private sector the development of Sampuraga tourism, (4). Increase the capacity of human resources (HR) in the field of tourism, (5). Involve the community in the development of tourism. In developing Sampuraga tourism the Mandailing Natal government faces obstacles, namely internal and external constraints. To overcome obstacles in the development of the Sampuraga tourist attraction, the Mandailing Natal government made efforts: (1). Provision of tourism infrastructure and facilities, (2). Promoting tourism, (3). Increasing the capacity of human resources (HR) in the tourism sector, (4). Cooperating with the community in tourism development. For the coming years, it is hoped that the role and attention of the Mandailing Natal government in the developments of the Sampuraga tourists attraction will increase and together with the community build, develop and manage the Sampuraga tourists attraction.

**Keywords : Implementation, Development, Tourist Attraction**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Objek Wisata Sampuraga Di Desa Sirambas”** dan salawat beserta salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini di tulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Administrasi Pemerintahan, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini, penulisan telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang tercinta untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Abdul Rahman dan Ibunda tercinta Anni Kholilah yang telah memberikn otivasi, nasehat, cinta, perhatian, kasih sayang dan doa restunya serta dorongan semangat dalam belajar baik secara moril ataupun materi dan memberikan kasih sayang tulus.
2. Bapak Prof. Dr. Agusani, M. A selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S. Sos., MSP selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Bapak Ananda Mahardika S. Sos., M. Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S. Sos.,M. Si selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Syafruddin, S. Sos., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepala Dinas Pariwisata Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara.
9. Bapak Kepala Desa dan Perangkat Desa Sirambas yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
10. Kepada Kakak tercinta Riski Hasanah, Abang tercinta Muhtadi Husni dan Gufon Mahfuddin yang telah memberikan dukungan serta menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk yang istimewa Ihsan Azizi Nasution yang selalu memberikan dukungan dan perhatian dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman seperjuangan, teman kost, teman satu kelas, teman seperdopingan Diana Sahfitri yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada teman-teman seperjuangan yang tersayang yang selalu memberikan dukungan serta selalu menyemangati penulis setiap hari untuk menyelesaikan skripsi ini khususnya, Putri Utami Hutabarat, Sri Venny Aryand Tanjung.

14. Dan seluruh kelas IAP B Sore Kebijakan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan dukungan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan skripsi ini. Terimakasih atas kritikan dan sarannya, smoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis, Amin.

Medan, September 2022

Penulis

Ainun Seridah

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
2.1 Pengertian Implementasi.....	8
2.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	9
2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	13
2.4 Pengertian Objek Wisata.....	14
2.5 Pengertian Pengembangan Objek Wisata .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	18
3.2 Kerangka Konsep.....	19

3.3 Defenisi Konsep .....	19
3.4 Kategorisasi.....	21
3.5 Narasumber .....	21
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.7 Teknik Analisis Data.....	23
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	25
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	26
3.9.1 Sejarah Singkat Kabupaten Mandailing Natal .....	26
3.9.2 Visi dan Misi Dinas Pariwisata Mandailing Natal .....	28
3.9.3 Struktur Organisasi .....	29
3.9.4 Tugas dan Fungsi .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	34
4.1.2 Penyajian Data .....	35
4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara .....	35
a. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Objek Wisata.....	35
b. Peningkatan Fasilitas, yang mencakup Kualitas dan Kuantitas di Sector Pelayanan Umum dan Kepariwisataaan .....	39
c. Menyediakan dan Memanfaatkan Teknologi dan Sistem Informasi Yang Aktual dan Akurat Sehingga Dapat MenunjangProgram Pemasaran dan Promosi .....	43
d. Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pengembangan Pariwisata	46
4.2 Pembahasan.....	48

4.2.1 Deskripsi Narasumber .....	49
a. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Objek Wisata.....	48
b. Peningkatan Fasilitas, Yang Mencakup Kualitas dan Kuantitas di Sektor Pelayanan Umum dan Kepariwisataaan .....	50
c. Menyediakan dan Memanfaatkan Teknologi dan Sistem Informasi Yang Aktual dan Akurat Sehingga Dapat Menunjang Program Pemasaran dan Promosi .....	52
d. Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pengembangan Pariwisata	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
5.1 Kesimpulan .....	55
5.2 Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	34
Tebel 4.2 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur.....	34

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Dokumentasi
- Lampiran II : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran III : Pedoman Wawancara
- Lampiran IV : SK-I Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran V : SK-II Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran VI : SK-III Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VII : SK-IV Undangan Seminar Proposal
- Lampiran VIII : SK-V Berita Acara Bimbingan
- Lampiran IX : SK-VI Permohonan Ujian Skripsi
- Lampiran X : SK-VIII Undangan Ujian Skripsi
- Lampiran XI : Surat Izin Riset
- Lampiran XII : Surat Balasan
- Lampiran XIII : Surat Keterangan Bebas Pustaka

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2 Kerangka Konsep .....	19
----------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pariwisata bukanlah sesuatu hal yang bersifat baru, dimana kegiatan ini sudah dikenal sejak dulunya, akan tetapi kegiatannya dilakukan secara sederhana, pariwisata dulunya lebih populer disebut dengan istilah “bertamasya” seiring dengan perkembangan tingkat kehidupan manusia dibidang sosial ekonomi, sosial budaya, serta teknologi maka bentuk kegiatan pariwisata menjadi suatu kegiatan yang lebih luas (makro).

Kegiatan pariwisata tersebut didorong oleh suatu keinginan untuk melihat keindahan alam pada suatu daerah atau wilayah, keindahan alam merupakan satu karunia Tuhan yang sangat berharga dalam kehidupan manusia untuk itu perlu dimanfaatkan secara baik dan tepat sehingga secara langsung tanpa disadari akan mempengaruhi kehidupan masyarakat menuju sejahtera, sebaliknya jika tidak dimanfaatkan dengan baik sudah barang tentu mengakibatkan kesengsaraan bagi kehidupan masyarakat. Hal demikian dijelaskan oleh (Samsuridjal, 1997) tidak semua negara atau daerah memiliki keindahan alam sehingga bagi negara atau daerah yang memiliki keindahan alam yang bagus sehingga bagi negara atau daerah yang memiliki keindahan alam mempesona diberdayakan secara baik dan tepat.

Dalam pengelolaan pariwisata dan memanfaatkan keindahan alam yang ada dalam pengelolaannya harus memperhatikan dan mengimbangi antara

pemanfaatan dan keseimbangan lingkungan sehingga tidak merusak lingkungan apalagi menyebabkan kerusakan ekosistem. Pemahaman akan pembangunan berwawasan lingkungan sangat diperlukan dalam pengembangan suatu tempat pariwisata, karena dengan pemahaman tersebut diharapkan akan dapat menjaga kelestarian alam dan tidak hanya mengambil keuntungan dari alam akan tetapi berusaha untuk menjaga kelestariannya untuk generasi mendatang.

Lebih jauh pariwisata ini dalam arti sempit, hanya memanfaatkan waktu yang senggang, akan tetapi dalam arti luas, yaitu menyangkut berbagai macam motivasi perjalanan, yang akan membawa pengaruh terhadap segi-segi kehidupan perorangan maupun masyarakat. Direktorat Jenderal Pariwisata (1988:4) di Indonesia pariwisata telah berperan nyata dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, kesempatan kerja, penambah devisa, keadaan sosial masyarakat makin baik dan kebudayaan bangsa makin memperkokoh apresiasi.

Berkembangnya sektor pariwisata disuatu negara akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri pariwisata, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Para pelaku pariwisata mulai melakukan tindakan pengembangan dengan penelitian, observasi terhadap obyek-obyek wisata di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan guna mengetahui potensi dan permasalahan yang ada pada setiap obyek untuk kemudian mencari solusinya. Langkah lainnya adalah promosi dengan media cetak, elektronik,

maupun multimedia agar masyarakat juga mengetahui akan keberadaan obyek-obyek tersebut dan turut berpartisipasi dalam pengembangannya.

Sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi daerah dari pusat kepada daerah suatu wilayah diharapkan dapat lebih menggali dan memanfaatkan potensi wilayahnya, sebagaimana terdapat dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang NO 55 Tahun 2016 “Bidang pengembangan destinasi pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek wisata, sarana, tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata, dan penyusunan master plan pariwisata.

Kabupaten Mandailing Natal dikenal sebagai wilayah pertanian dan sebagai dari semuanya itu merupakan potensi wisata yang harus dikembangkan secara maksimal, di samping alamnya yang mempesona juga budaya yang khas sebagai adat Mandailingnya (Pahompu, 2010).

Salah satu potensi alam tersebut yaitu Sampuraga terletak di Sirambas, Panyabungan Barat sejatinya memiliki daya pikat menarik wisatawan dari berbagai daerah di Sumut atau dari berbagai provinsi tetangga karena folk story Sampuraga sudah sedemikian luas sebarannya dan keterkenalannya. Hanya saja selama ini tak ditangani dengan serius dan baik.

Kebijakan pengembangan pariwisata pada kawasan Sirambas, yaitu Sampuraga diwujudkan melalui pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan aksesibilitas dan promosi. Akan tetapi pelaksanaannya masih belum maksimal, masih ditemukan masalah yang menghambat dalam pengimplementasiannya. Meskipun telah dilakukan upaya untuk pemenuhan sarana dan prasarana

pendukung kegiatan kepariwisataan, pada kenyataannya sarana dan prasarana yang ada masih belum memadai. Sarana dan prasarana yang ada dinilai masih kurang dalam mendukung kegiatan kepariwisataan, dalam hal ini fasilitas-fasilitas yang ada masih sangat terbatas dan minim dalam perawatannya. Selain itu, aksesibilitas menuju objek wisata masih belum memadai, kondisi jalan yang sempit dan tidak rata menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan.

Masalah dalam pengembangan pariwisata yaitu adanya keterbatasan anggaran, selain itu masih minimnya sumber daya manusia yang memadai dalam hal sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pariwisata. Dimana dalam bidang pengembangan pariwisata dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompetensi di bidangnya sehingga pengembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dalam hal koordinasi dengan instansi lain masih belum maksimal karena instansi-instansi lain lebih memprioritaskan tupoksinya masing-masing secara sektoral dan adanya keterbatasan anggaran.

Adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata juga dikemukakan pemerintah kurang melakukan komunikasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait rencana kebijakan pariwisata sehingga koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan pariwisata kurang dipahami oleh pemangku kebijakan yang lain, hal tersebut berdampak terhadap program kurang berjalan sebagaimana yang ditargetkan. Selain itu, dukungan berupa komitmen semua pihak tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena penyaluran (transmission) komunikasi kepada pemangku dan kebijakan (orang-orang yang tepat) sebagai pelaksana/implementor tidak terlaksana dengan baik (tidak

terkoneksi). Selain itu terdapat faktor penghambat lainnya yaitu sumber daya dan ketersediaan sumber dana sehingga implementasi kebijakan pariwisata masih bersifat ego sektoral dengan menjabarkan berdasarkan tupoksi dari masing-masing OPD.

Dalam penelitian yang dilakukan tentang implementasi kebijakan Pengembangan Objek Wisata Sampuraga di Kabupaten Mandailing Natal dikemukakan bahwa kendala yang juga dihadapi adalah komunikasi. Tidak semua hasil koordinasi dengan dinas-dinas lain mendapat respon yang baik. Selain itu, ditemukan adanya kesulitan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat setempat dalam hal kerjasama memelihara dan mendukung proses pembangunan fasilitas dan pelaksanaan program kegiatan serta adanya permasalahan terkait dengan sumber daya manusia yang kurang memadai. Dalam penelitian ini peneliti juga akan menjelaskan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata terkait dengan pengembangan destinasi yang didalamnya mencakup pemenuhan fasilitas dan aksesibilitas, kemudian terkait dengan promosi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dalam kesempatan ini peneliti tertarik mengupayakan kajian ilmiah dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Objek Wisata Sampuraga Di Desa Sirambas”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan

Peraturan Bupati Mandailing Natal Dalam Pengembangan Pariwisata Pada Kawasan Sampuraga, Sirambas”.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Mandailing Natal Dalam Pengembangan Pariwisata Pada Kawasan Sampuraga, Sirambas.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan perkembangan ilmu administrasi pendidikan dan sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti yang akan melakukan lebih lanjut.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai referensi kedepannya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II URAIAN TEORITIS**

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, yang akan menguraikan tentang Implementasi, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Pengembangan dan Desa Wisata.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan jenis Penelitian, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Lokasi Penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan hasil pengamatan dan penelitian dari sumber.

### **BAB V PENUTUP**

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Menurut (Nurdin Usman, 2002), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

(Wahab, 2018) mengatakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar dan biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Keputusan tersebut haruslah mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dalam mengatur proses implementasinya.

Ripley dan Franklin dalam (Winarno, 2007) implementasi adalah apa yang terjadi dalam undang-undang di tetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntung (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible Output).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu yang terencana yang dilakukan dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

## **2.2 Pengertian Kebijakan Publik**

### **a. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

(Chandler, Ralph C., dan Plano, 1988) menjelaskan kebijakan publik ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

(Wahab, 2016) mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya ketegasan tertentu sekaligus mencari sasaran peluang-peluang agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

(Easton, 1963) menjelaskan kebijakan publik adalah sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat.

Menurut Gertsen (2009) kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat. Upaya tersebut dilakukan di dalam setiap tingkatan pemerintahan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik.

Anderson (Islamy, 2001) mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan oleh sekelompok orang untuk dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan nilai yang telah ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan.

**b. Karakteristik Kebijakan Publik**

Menurut Hartono (2008:24) kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat pemerintah mempunyai beberapa karakteristik kebijakan publik, yaitu:

- a. Mempunyai tujuan tertentu
- b. Basis tindakan pola tindakan pejabat pemerintah
- c. Merupakan apa yang benar dilakukan oleh pemerintah bukan merupakan apa yang pemerintah maksud akan dilaksanakan
- d. Bersikap positif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
- e. Kebijakan publik harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (legalitas) dan bersifat memaksa

**c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Keputusan Kebijakan**

Menurut (Islamy, 2001) beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan antara lain:

- a. Adanya pengaruh tekanan dari luar

Administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semata tapi proses dan prosedur pembuatan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata.

b. Adanya faktor kebiasaan lama (konservatisme)

Kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan waktu sering kali digunakan untuk membiayai program-program tertentu, cenderung akan selalu diikuti kebiasaan administrator

c. Adanya pengaruh sifat pribadi

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuat keputusan

e. Adanya pangaruh masa lalu

Pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan terdahulu berpengaruh pada pembuat keputusan, seperti administrator tidak menimpahkan bagian wewenangnya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan

**d. Unsur-Unsur Kebijakan Publik**

Proses dari sebuah kebijakan dan struktur kebijakan dari sisi proses akan terdapat tahapan-tahapan identifikasi masalah dan tujuan, formulasi dan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan

Dilihat dari struktur terdapat beberapa unsur kebijakan, yaitu:

- a. Tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama dengan tujuan.
- b. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan sebagai masalah yang tidak benar.
- c. Tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab, yaitu pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses permusuhan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka
- d. Dampak. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan
- e. Sarana dan alat kebijakan. Sarana kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana. Beberapa sarana ini antara lain, kekuasaan, intensif.

### **2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif.

(Naditya, 2013) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

(Aneta, 2010) mengemukakan implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat diterima publik. Dalam hal ini dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya maka tidak akan jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk.

Disisi lain, dalam proses implementasi kebijakan juga diperlukan adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan dalam proses implementasi untuk dapat melihat bagaimana bagaimana implementasi kebijakan publik yang dimaksud dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan pendapat para ahli di atas juga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tahapan dalam

melakukan segala sesuatu agar tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat.

## **2.4 Pengertian Objek Wisata**

Objek wisata adalah sebuah tempat rekreasi/tempat berwisata. Objek wisata dapat berupa objek wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau berupa objek peninggalan sejarah, dll. Objek wisata atau “tourist attraction” adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Dalam Ilmu Kepariwisatawan, objek wisata atau lazim disebut atraksi merupakan salah sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatawan pasal 1 ayat 5, objek wisata atau disebut daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Menurut (Ridwan, 2012) objek wisata dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Objek wisata alam, misalnya: laut, pantai, gunung berapi, danau, sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.
- b. Objek wisata budaya, misalnya: upacara kelahiran, tari-tari (tradisional), pakaian adat, perkawinan adat, upacara turun kesawah, upacara panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival

wilayah, kain tenun (tradisional), tekstil lokal, pertunjukan tradisional, adat-istiadat lokal, musium dan lain-lain.

- c. Objek wisata buatan, misalnya: sarana dan fasilitas olahraga permainan (layangan), hiburan (lawak atau agrobatik, sulap), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusat-pusat pembelajaran dan lain-lain.

Menurut (Siregar, 2017) objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata, objek wisata sangat erat hubungannya dengan daya tarik wisata.

(Ridwan, 2012) mengemukakan pengertian objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Menurut SK. MENPARPOSTEL No.: KM. Adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa objek wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai daya tarik, keunikan dan nilai yang tinggi, yang menjadi tujuan wisatawan datang kesuatu daerah tertentu.

## **2.5 Pengertian Pengembangan Objek Wisata**

Menurut (Giantari, 2016) Pengembangan Objek Wisata adalah suatu usaha mengembangkan atau memajukan objek wisata agar, objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dan segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

Usaha-usaha pengembangan objek wisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara. Menurut (Marpaung, Happy & Bahar, 2002) pengembangan kepariwisataan dilandaskan atas usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Memelihara dan membina keindahan dan kekayaan serta kebudayaan masyarakat Indonesia sebagai daya tarik kepariwisataan.
- b. Menyediakan dan membina fasilitas-fasilitas transportasi, akomodasi, entertainment, dan pelayanan pariwisata lainnya yang diperlukan termasuk pendidikan pegawai.
- c. Menyelenggarakan promosi kepariwisataan secara aktif dan efektif dalam dan luar negeri.
- d. Mengusahakan kelancaran formalitas perjalanan dan lalu lintas para wisatawan dan dengan demikian menghilangkan unsur-unsur yang menghambatnya.
- e. Mengarahkan kebijaksanaan dan kegiatan perhubungan sebagai sarana utama guna memperbesar jumlah dan kelancaran arus wisatawan.

Menurut (Sastrayuda, Gumelar 2010) dalam perencanaan pengembangan meliputi:

- a. Pendekatan Participatory Planning, dimana seluruh unsur yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis.
- b. Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata.
- c. Pendekatan pemberdayaan masyarakat, adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar tercapai kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok.
- d. Pendekatan kewilayahan, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana.
- e. Pendekatan optimalisasi potensi, dalam optimalisasi yang ada di suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

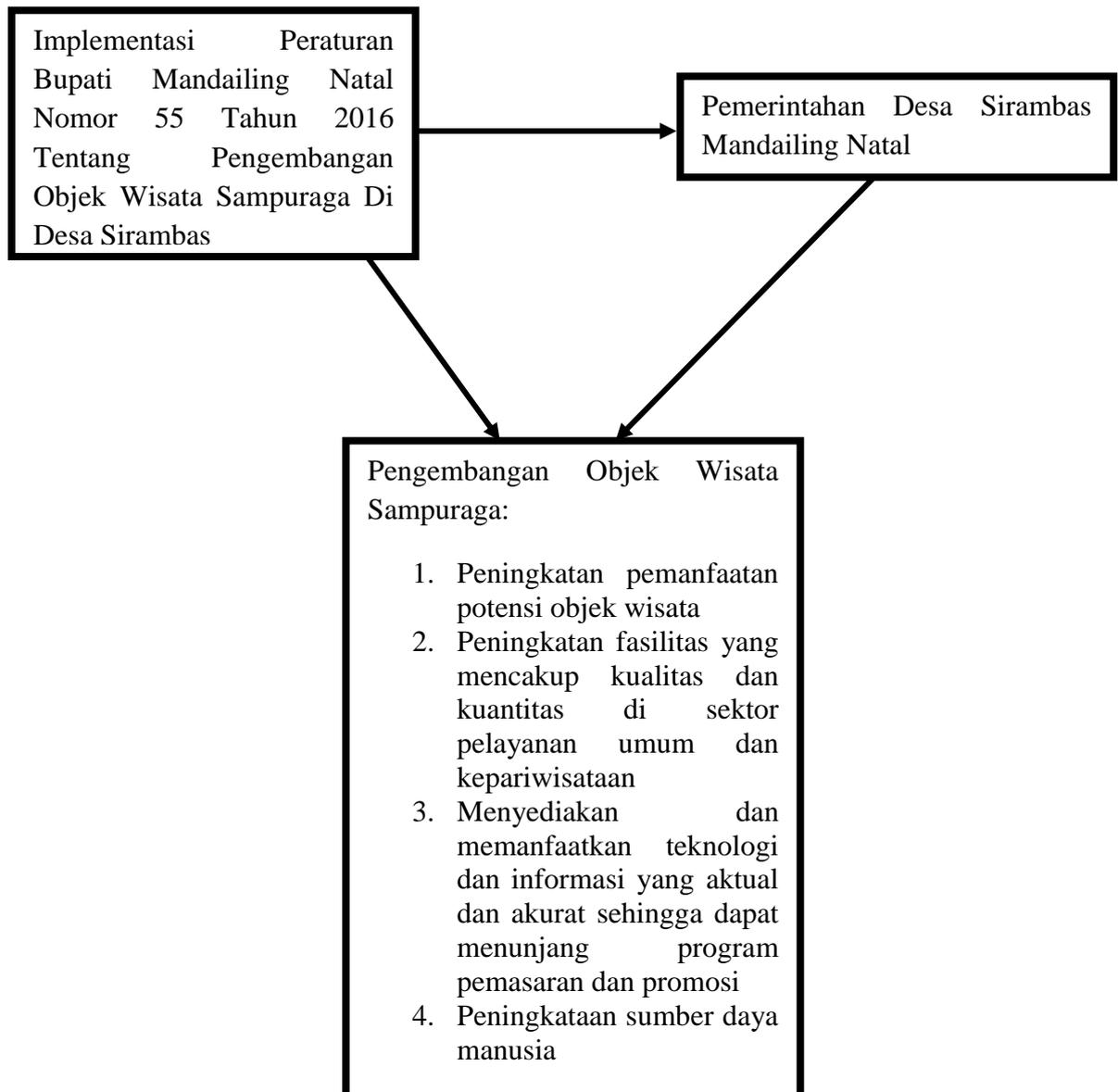
Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2013) mengatakan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic.

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektor terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, kemudian mendeskripsikan atau menggambarkan dalam bentuk laporan penelitian.

Sesuai dengan pendapat Arikunto yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu gejala atau keadaan (Arikunto, 2014).

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menggunakan metode deskriptif. Melalui metode ini, diharapkan dapat makna dan gambaran tentang peranan pemerintah Mandailing Natal dalam pengembangan Sampuraga.

### 3.2 Kerangka Konsep



### 3.3 Defenisi Konsep

Menurut Singarimbun dan (Effendi, 2009) konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan beerbagi fenomena yang sama. Konsep merupakan suatu

kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan. Dalam merumuskan kita harus dapat menjelaskan sesuai dengan maksud kita memakainya. Untuk dapat menentukan batasan yang lebih jelas agar lebih menyederhanakan pemikiran atas masalah yang sedang penulis teliti, maka peneliti menggambarkan konsep-konsep yang digunakan antara lain:

- a. Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.
- b. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan oleh sekelompok orang untuk dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan nilai yang telah ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan.
- c. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan program untuk menginteraksi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu agar tidak terjadi di masyarakat.
- d. Objek wisata adalah sesuatu yang dapat dilihat, dirasakan serta dinikmati oleh manusia sehingga menimbulkan perasaan senang dan kepuasan jasmani maupun rohani sebagai suatu hiburan.
- e. Pengembangan objek wisata dapat diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan (baik domestik maupun mancanegara).

### **3.4 Kategorisasi**

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan konsep kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemanfaatan potensi objek wisata
- b. Peningkatan fasilitas, yang mencakup kualitas dan kuantitas di sector pelayanan umum dan kepariwisataan
- c. Menyediakan dan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang aktual dan akurat sehingga dapat menunjang program pemasaran dan promosi
- d. Peningkatan sumber daya manusia. untuk pengembangan pariwisata

### **3.5 Narasumber**

Penelitian narasumber dalam penelitian adalah sekelompok orang atau individu yang benar-benar mengetahui dan memahami tentang tema penelitian yaitu Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Objek Wisata Sampuraga Di Desa Sampuraga yaitu:

- a. Kepala Dinas Pariwisata  
Nama: AHMAD YASIR LUBIS,S.P  
Umur: 46 tahun
- b. Kepala Desa Sirambas

Nama: ABU HANIFAH

Umur: 42 tahun

c. Masyarakat Desa Sirambas

Nama: SAMSUL NASUTION

Umur: 32 tahun

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

#### **Data Primer**

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan cara dan teknik pengumpulan data yang mengarah pada kegiatan secara akurat. Bagaimana peranan pemerintah Mandailing Natal dalam pengembangan objek wisata Sampuraga. Dalam hal ini peneliti langsung terjun kelapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap peranan pemerintah Mandailing Natal dalam pengembangan objek wisata Sampuraga.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yang digunakan adalah wawancara terstruktur (structured interview). Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang kadang-kadang disertai jawaban alternatif dari responden dengan maksud agar pengumpulan data dapat lebih terarah kepada tujuan penelitian dan pembuktian hipotesis. Wawancara terstruktur bertujuan memperoleh keterangan yang khusus berkaitan dengan masalah penelitian yang disusun dalam bentuk instrumen penelitian berupa daftar wawancara. Sebelum wawancara diadakan

terlebih dahulu di susun pedoman wawancara, agar penelitian ini lebih terkontrol dan sistematis.

### **Data Sekunder**

#### a. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

#### b. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi adalah dokumen tentang gambaran umum daerah penelitian pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diambil secara langsung oleh peneliti pada saat melakukan penelitian.

Dalam hal ini peneliti mencari dan membandingkan dokumen-dokumen yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi disini dapat berupa data-data tentang gambaran keadaan Sampuraga, jumlah penduduk, mata pencaharian dan sosial masyarakat, peranan pemerintah dalam Pengembangan Objek Wisata Sampuraga serta hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Miles dan Hunberman dalam (Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa aktivitas dan analisis data kualitatif dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus menerus. Analisis data kualitatif adalah analisis data interaksi yang meliputi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

## 1. Reduksi data (data reduction).

Mereduksi data berarti, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam penelitian ini data yang direduksi yaitu:

- a. Peranan pemerintah Mandailing Natal dalam pengembangan objek wisata Sampuraga
- b. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Mandailing Natal pengembangan objek wisata Sampuraga.
- c. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Mandailing Natal dalam Mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan objek wisata Sampuraga.

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentablean. Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

## 2. Penyajian data (data display)

Penyajian data dalam kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, data dan informasi yang telah diperoleh dilapangan dimasukkan kedalam suatu teks. Dalam penelitian ini peneliti menuliskan data yang direduksi.

Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu sehingga kelihatan bentuk yang lebih utuh.

### 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih bersifat remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Verifikasi dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari data yang dikumpulkan, dan dapat menarik kesimpulan tentang apa yang diteliti.

### **3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan saat melakukan penelitian. Adapun tempat yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah di Desa Sirambas, Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal izin penelitian dalam kurun waktu yaitu bulan April

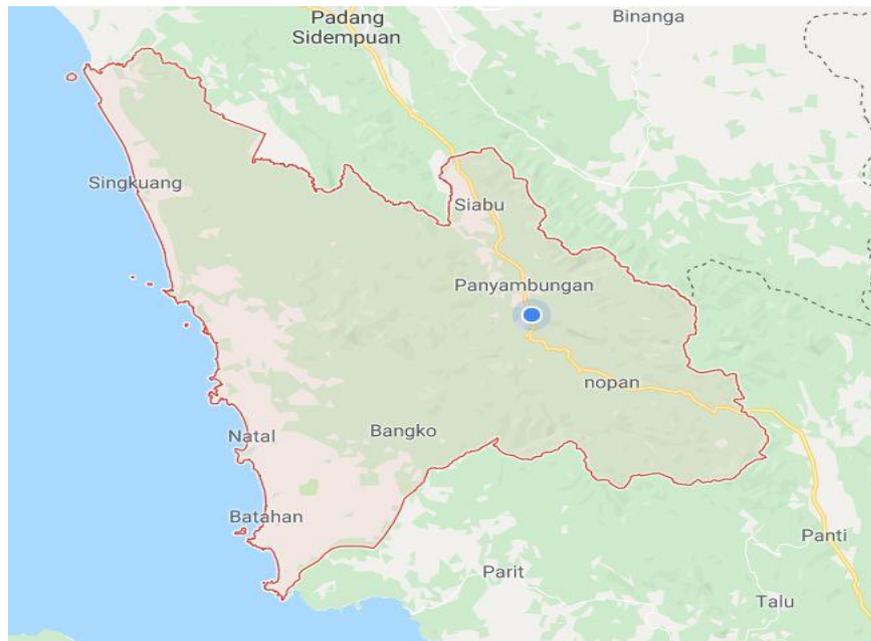
sampai dengan bulan Juli 2022 yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

### **3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**

#### **3.9.1 Sejarah Singkat Kabupaten Mandailing Natal dan Objek Wisata Sampuraga**

Kabupaten Mandailing Natal adalah sebuah kabupaten yang berada di bagian paling selatan Sumatera Utara yang mempunyai luas 6.620,7 km (9,23%) dari wilayah Sumatera Utara. Penduduknya berjumlah sekitar 413,750 jiwa dengan 23 Kecamatan dan 386 desa. Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten wilayah ini termasuk kabupaten Tapanuli Selatan setelah terjadi pemekaran dibentuklah kabupaten Mandailing Natal berdasarkan UU no 112 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh menteri dalam negeri pada tanggal 9 maret 1999.

Letak geografis Mandailing Natal terletak pada 0 derajat 10<sup>0</sup>-1 derajat 50<sup>0</sup> lintang utara dan 98 derajat 10<sup>0</sup>-100 derajat 10<sup>0</sup> bujur timur dengan ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut.



Batas-batasnya adalah:

1. Sebelum utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.
4. Sebelah timur berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat.

Legenda Sampuraga adalah salah satu cerita rakyat dari Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Legenda ini terkait dengan objek wisata kolam Sampuraga yang berlokasi di Desa Sirambas Kecamatan Panyambungan Barat. Cerita rakyat legenda Sampuraga ini berkisah tentang seorang anak durhaka yang mendapat kutukan dari ibunya.

### 3.9.2 Visi dan Misi

#### a. Visi

Visi adalah suatu yang menata tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mandailing Natal dipandang perlu merumuskan dan menetapkan visi pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Mandailing Natal adalah “Terwujudnya pemuda dan masyarakat olahraga yang sportif, mandiri, berprestasi serta meningkatkan kebudayaan dan pariwisata yang kreatif. Adapun makna dari visi tersebut adalah:

Pemuda: Masyarakat yang berusia 18 s/d 35 tahun.

Masyarakat Olahraga: Masyarakat yang melaksanakan segala kegiatan yang sistematis.

sportif: Berjiwa besar menerima kemenangan dan kekalahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mandiri: Mampu bertahan hidup tanpa ketergantungan kepada orang lain.

Berprestasi: Hasil upaya maksimal yang dicapai dalam setiap kegiatan.

Kebudayaan: Suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Pariwisata: Keseluruhan kegiatan proses dan kaitan-kaitan yang berhubungan dengan perjalanan dan persinggahan orang-orang diluar tempat tinggalnya serta tidak dengan maksud mencari nafkah.

Kreatif: Daya cipta atau proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau konsep baru.

#### **b. Misi**

Misi adalah langkah-langkah strategis yang dilahirkan untuk mencapai Visi Misi

1. Meningkatkan kinerja aparatur.
2. Meningkatkan pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda.
3. Meningkatkan pembinaan masyarakat olahraga.
4. Meningkatkan sarana dan prasana olahraga.
5. Meningkatkan kualitas dan daya tarik pariwisata.
6. Melestarikan nilai-nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat diri.

### **3.9.3 Struktur Organisasi**

Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahi:
  1. Sub bagian umum dan kepegawaian
  2. Seksi sumber daya alam wisata.
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
  1. Seksi pemberdayaan sarana wisata
  2. Seksi sumber daya alam.

- d. Bidang Usaha Jasa dan Sarana Wisata, membawahi:
  - 1. Seksi jasa dan sarana wisata
  - 2. Seksi aneka usaha jasa, sarana wisata, dan akomodasi
- e. Bidang Promosi Dan Pemasaran Pariwisata, membawahi:
  - 1. Seksi informasi wisata
  - 2. Seksi promosi wisata
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

### **3.9.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Mandailing Natal**

#### **1. Kepala Dinas Pariwisata**

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah serta tugas pembantuan di bidang Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pariwisata
- b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pariwisata
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pariwisata
- d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pariwisata
- e. Melaksanakan pembinaan pegawai dilingkungan Dinas
- f. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas

- g. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku
- h. Menilai prestasi bawahan sebagai pertimbangan dalam pengembangan karir.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- j. Menyampaikan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui sekretaris daerah
- k. Perumusan kebijakan teknis Dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagai urusanpemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
- l. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan dan//atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagai urusan pemerintahan dibidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

## **2. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Bidang pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan objek wisata, sarana, tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata, dan penyusunan master plan pariwisata. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan:

- a. Pembinaan dan pengembangan objek wisata, tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata
- b. Pemenatauan dan evaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan objek wisata, tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam
- c. Penyusunan laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan objek wisata, dan usaha jasa kepariwisataan
- d. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

## **3. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata**

Bidang promosi dan pemasaran pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pemantauan dalam rangka pengembangan jaringan usaha pemasaran wisata:

- a. Pelaksanaan upaya pengembangan pemasaran wisata
- b. Peningkatan kerjasama pemasaran baik di dalam maupun luar negeri dengan menonjolkan keunggulan-keunggulan daerah

- c. Peningkatan koordinasi pengembangan jaringan aksesibilitas
- d. Pelaksanaan promosi intensif di dalam dan di luar negeri
- e. Perancangan dan mensinergikan pembuatan even-even untuk meningkatkan kunjungan
- f. Peningkatan kemitraan pengembangan produk dan promosi
- g. Peningkatan pembangunan sistem informasi pelayanan kepariwisataan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa informan di Desa Sirambas.

**Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	3	100%
2.	Perempuan	-	
	<b>Total</b>	3	100%

Sumber data wawancara 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 100%.

**Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1.	20-35	1	20%
2.	36-50	2	80%

	<b>Total</b>	3	100%
--	--------------	---	------

Sumber data wawancara 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa wisata Sampuraga memeadukan antara kalangan muda dan yang berusia matang dalam membantu pengembangan wisata.

#### **4.1.2 Penyajian Data**

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu dengan Bapak Ahmad Yasir Lubis,SP selaku Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Abu Hanifah selaku Kepala Desa Sirambas, Bapak Samsul Nasution selaku pengunjung objek wisata Sampuraga.

#### **4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara**

##### **a. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Objek Wisata**

Potensi daerah dijelaskan dalam (Soleh, 2017) adalah kemampuan yang dimiliki suatu wilayah yang mana mempunyai kemampuan untuk dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut. Dengan adanya objek wisata disuatu daerah, masyarakat di desa tersebut dapat mempunyai pentapatan alternatif yang mana akan membantu pembangunan di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ahmad Yasir Lubis, SP selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal pada Senin, 18 Juli 2022 menyatakan:

*“Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi wisata yang besar, seperti potensi wisata alam sangat besar karena Kabupaten Mandailing Natal yang luas. Upaya pengembangan objek wisata Sampuraga yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Bupati Mandailing Natal pada tahun 2009, yaitu meningkatkan sarana dan prasarana dan akses transportasi menuju objek wisata Sampuraga. Dinas Pariwisata mendorong pengelola objek wisata Sampuraga dan masyarakat untuk memunculkan daya tarik wisata. Dalam beberapa kesempatan pihak Dinas Pariwisata telah menerima tamu dan undangan, hal tersebut memunculkan kesempatan untuk menampilkan gambaran wisata Sampuraga dengan memunculkan objek budaya sekitar.”*

Kemudian bapak Ahmad Yasir Lubis juga berbicara tentang kontribusi masyarakat dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal:

*“Mengenal kontribusi masyarakat sekitar memang masih butuh dorongan yang kuat dan memfasilitasi agar mereka memberikan kontribusi. Masyarakat sekitar wisata Sampuraga lebih cenderung untuk berjualan makanan dan ada beberapa tampilan budaya Mandailing Natal seperti Gordang Sambilan, namun ini dilakukan hanya pada hari-hari besar keagamaan saja. Penghambat internal pada objek wisata Sampuraga yaitu tanahnya masih merupakan milik masyarakat sekitar dan hanya bangunannya saja yang merupakan milik pemerintah mempengaruhi pembangunan*

*dikarenakan harus memiliki izin dari masyarakat sekitar. Sedangkan masalah eksternal yaitu kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan Dinas Pariwisata dalam hal pengelolaan dan pengembangan objek wisata.”*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Abu Hanifah selaku Kepala Desa Sirambas yang dilakukan pada Senin, 18 Juli 2022 menyatakan:

*“Sebagai wilayah yang kaya akan hutan dan sumber daya air, di kabupaten Mandailing Natal terdapat begitu banyak danau dan sungai. Selain danau dan sungai, sejak dahulu kabupaten Mandailing Natal juga terkenal akan adanya mata air panas yang mengandung belerang dan di percaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Salah satu yaitu wisata sampuraga yang berupa kubangan-kubangan air panas yang terletak didesa Sirambas ini. Saat ini sudah ada upaya pengembangan wisata Sampuraga dari Dinas Pariwisata yaitu dengan mendorong masyarakat setempat untuk mendirikan kelompok yang bertujuan untuk ikut serta mengelola dan mengembangkan objek wisata. Namun masih terdapat beberapa penghambat baik dari segi internal maupun eksternal.”*

Kemudian bapak Samsul Nasution yang merupakan salah satu wisatawan Objek Wisata Sampuraga mengatakan:

*“Banyaknya lokasi wisata alam yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Meski tak seelok tempat wisata lainnya di Kabupaten Mandailing Natal, Sampuraga menjadi tempat yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan lokal. Lokasinya yang tidak jauh dari pemukiman padat Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat, beberapa kolam yang airnya panas tampak dipagari dikelilingi semak belukar, meski begitu tidak mengurangi keindahan wisata ini. Masyarakat yang ramah dan sopan menambah rasa nyaman wisatawan saat berkunjung.”*

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Narasumber dapat disimpulkan bahwa Kabupaten mandailing Natal merupakan salah satu sektor pariwisata yang potensial untuk dikelola, dikembangkan serta disosialisasikan kepada masyarakat secara luas. Kabupaten mandailing natal sedikitnya memiliki 150 destinasi wisata hampir di setiap kecamatan, misalnya destinasi wisata alam Sampuraga yang terletak di desa Sirambas. Untuk meningkatkan potensi objek wisata dibutuhkan keterkaitan 3 (tiga) Stakeholder utama, yaitu: pemerintah, swasta dan masyarakat. Tiga elemen tersebut harus saling bersinergi dan melangkah bersama-sama untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dari pengembangan kepariwisataan. Oleh karena itu, upaya pengembangan pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta sangat membutuhkan dukungan penuh dan partisipasi aktif dari masyarakat.

**b. Peningkatan fasilitas yang mencakup kualitas dan kuantitas di sektor pelayanan umum dan kepariwisataan.**

Seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan untuk sementara waktu ke tempat tujuan wisata, tentunya memerlukan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Kehadiran wisatawan juga ditentukan oleh kemudahan-kemudahan yang diciptakan, mulai dari pelayanan yang baik, kemudahan akomodasi, prasarana dan sarana yang memadai sampai kepada kesadaran masyarakat sekitarnya.

Pengembangan sarana dan prasarana menjadi sangat penting dalam pengembangan objek pariwisata karena merupakan parameter keberhasilan pengelolaan secara umum, disamping pengelolaan faktor-faktor lainnya. Kegiatan ini terdiri dari inventarisir, penataan, pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan. Keberadaan prasarana dan sarana dalam pengembangan pariwisata menjadi faktor penentu pengembangan suatu tempat pariwisata demikian pula halnya dalam pengembangan objek wisata Sampuraga akan tetapi sejauh ini prasarana dan sarana di objek wisata Sampuraga masih kurang.

1). Prasarana pada Objek Wisata Sampuraga

Berkaitan dengan prasarana pariwisata di Sampuraga ini terbilag baik dan lancar, ini terlihat dari kelancaran arus transportasi, demikian pula halnya prasarana komunikasi, listrik dalam keadaan baik, akan tetapi dalam sistem perbankan masih sangat kurang karena di daerah ini sama sekali tidak ada perbankan.

Sedangkan dalam hal keamanan yang merupakan hal penting bagi wisatawan karena jika keamanan tidak terjamin maka wisatawan akan enggan untuk mengunjungi suatu objek wisata.

## 2). Sarana pada Objek Wisata Sampuraga

Selain prasarana, sarana pariwisata juga perlu untuk dilakukan pembenahan dan perbaikan. Adapun sarana ini meliputi musholla, toilet, tempat parkir, akses jalan, tempat makan, tempat istirahat wisatawan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Ahmad Yasir Lubis pada tanggal 18 Juli 2022 menyatakan:

*“Kualitas sarana, prasarana umum dan fasilitas di tempat pariwisata Sampuraga sampai saat ini sedang di adakan pembangunan seperti jalan, tempat ibadah, toilet, serta tempat parkir oleh dinas pariwisata dan kebudayaan yang melalui intruksi Bupati Mandailing Natal dengan mengalokasikan anggaran untuk renovasi dan menata ulang destinasi Wisata sampuraga. Oleh pengelola objek wisata dilakukan beberapa perawatan karena ada sarana yang mengalami kerusakan misalnya pagar pembatas kolam sampuraga akibat terkena efek dari belerang mengakibatkan besi mengkarat. Namun masih banyak fasilitas yang harus ditingkatkan lagi, karena objek wisata Sampuraga dari desain awalnya baru 30% yang selesai dikerjakan. Jadi masih dibutuhkan 70% lagi fasilitas yang harus ditingkatkan. Penambahan infrastruktur dan fasilitas diharapkan mampu meningkatkan*

*kembali popularitas destinasi wisata Sampuraga yang sempat tenggelam.””*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Abu Hanifah pada Senin, 18 Juli 2022 menyatakan:

*“Sampai saat ini Alhamdulillah sedang dilakukan pengembangan sarana seperti lampu sudah masuk, jalan sudah diperbaiki, musholah dan toilet sudah tersedia, dan lain-lain. Sarana dan prasarana yang tersedia terawat dengan baik dan masih dapat digunakan oleh wisatawan. Tetapi ada sarana dan prasaran yang mesti ditingkatkan menyangkut objek wisata Sampuraga merupakan objek wisata legenda, dimana sarana tersebut merupakan patung-patung dan beberapa bangunan yang menjadi ciri khas kerajaan zaman dulu. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut di harapkan dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung.”*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Samsul Nasution pada Senin, 18 Juli 2022 menyatakan:

*“Anak-anak sering mendengarkan tentang Sampuraga yang konon katanya durhaka kepada orang tuanya, sehingga anak-anak saya kepingin melihat langsung bagaimana air panas Sampuraga ini. Namun kita sedikit kecewa karena lokasi wisata ini tak menawarkan apa-apa. Memang katanya beberapa tahun yang lalu telah melakukan renovasi dan perbaikan beberapa fasilitas yang*

*ada di objek wisata Sampuraga tersebut, namun sekarang ini fasilitas tersebut terlihat kurang perawatan dan terkesan dibiarkan saja sehingga tidak tertata rapi. Kalau memang Sampuraga ini dipoles dengan baik maka akan menjadi salah satu objek wisata yang sangat terkenal karena cerita tentang Sampuraga yang menasional, jadi kita sangat mengharapkan Pemkab Mandailing Natal dapat melestarikan objek wisata ini.”*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber dapat di ambil kesimpulan bahwa keberadaan destinasi wisata Sampuraga telah menarik perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal sehingga mendapat dukungan pengalokasian anggaran pengembangan dan penambahan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Upaya pengembangan objek wisata Sampuraga di Desa Sirambas dilakukan melalui pembangunan fasilitas yang mencakup kualitas dan kuantitas sector pelayanan umum, mendukung secara bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan akomodasi dan daya dukung kawasan objek wisata Sampuraga dalam memenuhi kebutuhan pengunjung. Ketersediaan fasilitas pendukung yang mulai memadai dalam memenuhi kebutuhan pengunjung tentunya meningkatkan jumlah pengunjung ke kawasan destinasi wisata Sampuraga ini. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di objek wisata Sampuraga ini meliputi:

a). Mushola

Mushola merupakan salah satu sarana yang ada di tempat wisata Sampuraga. Mushola masih perlu dilakukan perbaikan karena kondisi yang tidak terawat.

b). Tempat istirahat pengunjung

Sama halnya dengan mushola tempat istirahat pengunjung juga perlu dilakukan pembangunan dan perbaikan karena kondisinya yang sudah mulai rusak.

c). Tempat makan pengunjung

Kondisi tempat makan pengunjung sebagian masih bisa dikatakan baik karena masih bagus tapi tidak semua kondisi tempat makan di pariwisata Sampuraga ini kondisinya seperti ini akan tetapi masih memerlukan pembangunan, perbaikan dan pembenahan sehingga dengan perbaikan yang dilakukan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

d). Toilet

Kondisi toilet/wc di tempat wisata Sampuraga masih kurang bersih. Ini terlihat dari keadaan di dalam toilet kotor dan menimbulkan bau yang kurang sedap, hal seperti ini jika terus dibiarkan akan membuat pengunjung merasa kurang nyaman karena bau yang ditimbulkan.

e). Tempat Parkir

Tempat parkir juga merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan sarana suatu tempat pariwisata, kondisi tempat parkir di pariwisata Sampuraga untuk saat ini sedang dalam pembangunan.

**c. Menyediakan dan memanfaatkan teknologi dan sistem yang aktual dan akurat sehingga dapat menunjang program pemasaran dan promosi.**

Pemasaran atau promosi destinasi objek wisata adalah aktivitas destinasi pariwisata dalam menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan dan

menukarkan segala penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan dan dengan memberikan keuntungan serta tetap bertanggung jawab terhadap masyarakat secara luas.

Promosi objek wisata Sampuraga dimaksudkan untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata ini. Melalui promosi diharapkan sebagai upaya untuk lebih mengenalkan lokasi ini kepada dunia luar. Sehingga para wisatawan tertarik dan akhirnya mengunjungi objek wisata yang dimaksud. Kegiatan promosi memberikan gambaran yang dapat menciptakan citra bagi daerah tujuan wisata yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Ahmad Yasir Lubis pada Senin, 18 Juli 2022 menyatakan:

*“Dari segi pemasaran dan promosi telah dilakukan secara berulang-ulang. Dalam setiap event wisata dalam bentuk beberapa pameran, dibuatkan video khusus untuk wisata, kita membuat flayer-flayer di media sosial untuk objek wisata Sampuraga. Kemudian kita mengajak beberapa komunitas untuk datang berkunjung ke objek wisata Sampuraga. Dinas Pariwisata menggunakan promosi ada berbagai macam, kalo dari offline yaitu event termasuk pameran, dari media sosial pun dilakukan promosi bersama dengan beberapa lembaga swasta, jadi orang lebih mengenal Sampuraga. Tetapi menurut kami promosi yang dilakukan masih kurang baik atau belum sempurna, karena ada beberapa hal jangkauan dari promosi ini belum terlalu luas karena*

*dibutuhkan dana yang besar, sehingga promosi yang dilakukan belum maximal.”*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Abu Hanifah pada Senin, 18 Juli 2022 menyatakan:

*“Untuk hal promosi kami saling gotong royong. Melalui sosial media seperti facebook, instagram, youtube, dan lain-lain. Dalam hal ini dinas Pariwisata beserta pengelola objek wisata bersama-sama dalam memperkenalkan wisata Sampuraga ke masyarakat luas. Namun untuk promosi secara langsung seperti pembagian brousur belum ada dilakukan.”*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Samsul Nasution pada Senin, 18 Juli 2022 menyatakan:

*“Untuk objek wisata Sampuraga sendiri saya mengetahuinya dari beberapa orang yang sudah pernah berkunjung kesini. Ada juga dari informasi sosial media yang saya lihat misalnya dari facebook yang menampilkan pesona wisata sampuraga yang membuat saya dan keluarga tertarik untuk berkunjung.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan wisata Sampuraga dengan melalui kegiatan promosi wisata, baik yang dilakukan oleh internal pengelola destinasi maupun pemerintahan daerah. Pengembangan wisata melalui promosi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang ada saat ini yaitu melalui media sosial seperti facebook, youtube, dan lain-lainnya. Dalam beberapa kesempatan oleh Dinas

Pariwisata melakukan pameran upaya untuk memperkenalkan lebih luas tentang objek wisata Sampuraga.

#### **d.Peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk pengembangan pariwisata**

Pengembangan sumber daya manusia memiliki pengertian sebagai kegiatan perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari SDMnya dalam kurun waktu tertentu. Alasan dari pentingnya sumber daya manusia pada pengembangan pariwisata adalah karena pariwisata tidak dapat dilakukan perwakilan, akan tetapi kegiatan pariwisata haruslah dirasakan oleh dirinya sendiri.

Pelayanan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas sebuah objek wisata. Sumber Daya Manusia mulai dari pengelola sampai kepada masyarakat berpera sangat penting dalam keberhasilan pengembangan pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Ahmad Yasir Lubis pada Senin, 18 Juli 2022 menyatakan:

*“Untuk objek wisata Sampuraga sudah beberapa kali dilaksanakan sosialisasi dan juga pelatihan pengembangan objek wisata termasuk dengan kita menghadirkan beberapa pelaku wisata seperti dari himpunan prabu wisata Indonesia. Diperlukannya pengembangan Sumber Daya Manusia karena pariwisata kekuatannya adalah pada kenyamanan terkait dengan infrastruktur*

*dan kenyamanan pada sapa pesonanya yaitu tempatnya bersih, tempatnya indah, tempatnya sejuk, dan masyarakatnya ramah tamah. Terkait dengan masyarakat yang ramah tamah ini merupakan berkat Sumber Daya Manusia yang baik. Jadi kalo tidak direncanakan Sumber Daya Manusianya dengan baik dapat mengakibatkan bangunan-bangunan sarana prasarana kurang bermanfaat karena pengunjung takut untuk datang ke objek wisata itu, orang jadi tidak nyaman datang kesana karena banyak konflik terjadi antara masyarakatnya. Itu karena SDM nya tidak tau cara menyambut pengunjung agar merasa senang datang ke objek wisata itu. Jadi makanya pengembangan SDM ini menjadi sangat penting bagi tempat wisata. Dalam mengatasi SDM yang kurang memadai dilakukan pendekatan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, membawa ketempat-tempat yang sudah berhasil, kemudian memberikan fasilitas untuk mereka menghidupkan perekonomiannya.”*

Kepariwisata Indonesia adalah pariwisata yang erasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip ini menekankan keterlibatan masyarakat secara langsung, terhadap seluruh kegiatan pembangunan pariwisata. Masyarakat diletakkan sebagai faktor utama, yang memiliki kepentingan berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Abu Hanifah pada Senin, 18 Juli 2022 menyatakan:

*“Untuk upaya peningkatan kualitas SDM untuk saat ini sudah ada, kemaren pengelola melakukan pelatihan ke Medan yang bertempat di Hotel Garden. Sebagian besar SDM adalah masyarakat di lingkungan Desa Sirambas. Permasalahan yang dimiliki untuk objek Wisata Sampuraga untuk SDM meliputi keterlibatan SDM yang ada di Desa Sirambas ini masih sedikit.”*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Samsul Nasution pada tanggal 18 Juli 2022 menyatakan:

*“Saat saya berkunjung ke sini yang saya rasakan bahwa SDM nya cukup baik, seperti pengelola objek wisata dan masyarakat sekitar yang ramah kepada pengunjung, Ini membuat saya nyaman berwisata ke objek wisata Sampuraga.”*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat disekitar objek wisata. Dinas Pariwisata dan pemerintahan daerah memberikan pelatihan kepada pengelola objek wisata untuk mengatasi SDM yang kurang memadai.

## **4.2 Pembahasan**

### **a. Meningkatkan pemanfaatan potensi objek wisata**

Pada dasarnya terdapat banyak daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang potensial untuk di kelola dalam rangka kepariwisataan serta memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu destinasi pariwisata kelas

dunia. Kekayaan alam berbasis bahari merupakan potensi yang tinggi untuk dikelola dan dikembangkan tanpa menghilangkan potensi yang ada di daratan seperti danau, air panas dan sungai.

Potensi wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah tujuan wisata, dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ketempat tersebut. Meningkatkan pemanfaatan potensi objek wisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik di tinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada di dalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan objek wisata Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikelola, dikembangkan serta disosialisasikan. Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi wisata yang besar, seperti potensi wisata alam sangat besar karena Mandailing Natal yang luas. Salah satu yaitu wisata Sampuraga yang berupa kubangan-kubangan air panas yang terletak di Desa Sirambas. Upaya pengembangan wisata Sampuraga di dorong oleh Dinas Pariwisata dan masyarakat sekitar. Namun terdapat penghambat baik internal maupun eksternal.

Hal ini sesuai dengan Chandler dan Plano (1988) menjelaskan kebijakan publik ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Mandailing Natal memiliki pemanfaatan potensi wisata alam sangat besar karena Mandailing Natal yang luas.

Sumberdaya dalam meningkatkan upaya pengembangan wisata Sampuraga di dorong oleh Dinas Pariwisata dan masyarakat sekitar. Dinas Pariwisata dan masyarakat harus bekerjasama dalam meningkatkan pemanfaatan objek wisata Sampuraga agar berjalan dengan baik dan lancar. Upaya peningkatan potensi wisata yang dilakukan belum sepenuhnya tercapai dan belum dapat maksimal dikarenakan adanya penghambat baik internal maupun eksternal.

**b. Peningkatan fasilitas, yang mencakup kualitas dan kuantitas di sector pelayanan umum dan kepariwisataan.**

Salah satu hal penting untuk pengembangan pariwisata adalah melalui fasilitas (kemudahan). Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa kualitas sarana, prasarana umum dan fasilitas di tempat pariwisata Sampuraga saat ini sedang dalam pembangunan. Pembangunan sarana seperti lampu sudah masuk, jalan sudah diperbaiki, musholah dan toilet sudah tersedia, dan lain-lain. Sarana dan prasarana yang tersedia terawat dengan baik dan masih dapat digunakan oleh wisatawan. Wisatawan yang datang berkunjung juga mendapatkan pelayanan lain selain dari sarana dan prasarana, seperti tourgayt/petugas yang menerangkan tentang objek wisata Sampuraga. Namun masih banyak fasilitas yang harus ditingkatkan lagi, karena objek wisata Sampuraga dari desai awalnya baru 30% yang selesai dikerjakan.

Hal ini sesuai dengan Gertsen (2009) menurutnya kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat. Upaya tersebut dilakukan di dalam setiap tingkatan pemerintahan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik.

Maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam peningkatan fasilitas yang mencakup kualitas dan kuantitas di sektor pelayanan umum dan kepariwisataan untuk saat ini sedang dilakukan pengembangan sarana dan prasarana. Kualitas sarana, prasarana dan fasilitas di tempat pariwisata Sampuraga sedang diadakan pembangunan seperti jalan, tempat ibadah, toilet, serta tempat parkir oleh Dinas Pariwisata melalui intruksi Bupati Mandailing Natal. Oleh pengelola objek wisata dilakukan beberapa perawatan karena ada sarana yang mengalami kerusakan. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

**c. Menyediakan dan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang aktual dan akurat sehingga dapat menunjang program pemasaran dan promosi**

Peranan teknologi dalam pemasaran yakni menunjang kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan sehingga pemasaran barang dan jasa dapat berjalan secara maksimal. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor pariwisata cukup besar dan penting, karena dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi memudahkan para wisatawan untuk mengetahui lebih mudah tentang tempat-tempat wisata yang ada sekalipun di daerah terpencil.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pemasaran dan promosi telah dilakukan secara berulang-ulang. Untuk promosi dilakukan dengan cara gotong royong antara Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal dengan masyarakat sekitar objek wisata Sampuraga. Promosi dilakukan dengan dua cara yaitu secara online dan offline. Promosi secara online dilakukan dengan menampilkan pesona wisata Sampuraga melalui media sosial seperti facebook, instagram, youtube, dan lain-lain. Sedangkan promosi secara offline dilakukan melalui event-event seperti pameran.

Hal ini sesuai dengan (Nurdin Usman, 2002), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan wisata Sampuraga bermuara pada aksi tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem baik yang dilakukan oleh internal pengelola destinasi maupun pemerintahan daerah. Untuk mencapai tujuan kegiatan pengembangan wisata melalui promosi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang ada saat ini yaitu melalui media sosial. Dalam beberapa kesempatan oleh Dinas Pariwisata melakukan pameran upaya untuk memperkenalkan lebih luas tentang objek wisata Sampuraga. Namun promosi yang dilakukan masih kurang baik atau belum sempurna, karena ada beberapa hal jangkauan dari promosi ini belum terlalu luas sehingga promosi yang dilakukan belum maksimal.

**d. Peningkatan sumber daya manusia untuk pengembangan pariwisata.**

Keberadaan SDM berperan penting dalam pengembangan pariwisata. SDM pariwisata mencakup wisatawan/pelaku wisata (tourist) atau sebagai pekerja (employment). Peran SDM sebagai pekerja dapat berupa SDM di lembaga pemerintah, SDM yang bertindak sebagai pengusaha (wirausaha) yang berperan dalam menentukan kepuasan dan kualitas para pekerja, para pakar dan profesional yang turut berperan dalam mengamati, mengendalikan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan serta yang tidak kalah pentingnya masyarakat sekitar kawasan wisata yang bukan termasuk kedalam kategori di atas, namun turut menentukan kenyamanan, kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan SDM untuk objek wisata Sampuraga sudah ada. Upaya peningkatan SDM dilakukan dengan sosialisasi dan pelatihan dengan menghadirkan beberapa pelaku wisata seperti himpunan prabu wisata Indonesia. Diperlukannya pengembangan SDM karena pariwisata kekuatannya adalah pada kenyamanan terkait dengan infrastruktur dan kenyamanan pada sapta pesonanya. Makanya pengembangan SDM ini menjadi sangat penting bagi tempat wisata. Namun masih ada yang kurang memadai dalam SDM pada objek wisata Sampuraga.

Hal ini sesuai dengan (Easton, 1963) menjelaskan kebijakan publik adalah sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mangikat.

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik untuk peningkatan SDM untuk pengembangan pariwisata menjadi pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya terikat dengan objek wisata Sampuraga. Upaya pengembangan SDM objek wisata Sampuraga dilaksanakan dengan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat sekitar objek wisata. Dinas Pariwisata dan pemerintahan daerah memberikan pelatihan kepada pengelola objek wisata untuk mengatasi SDM yang kurang memadai. Permasalahan yang dimiliki untuk objek wisata Sampuraga untuk SDM meliputi keterlibatan SDM yang ada di Desa Sirambas masih sedikit.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu sektor pariwisata yang potensial untuk di kelola, dikembangkan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas. Sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah maka kabupaten Mandailing Natal di haruskan untuk menggali potensi daerah. Pada Pasal 8 Ayat 1 dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 55 Tahun 2016 yang berisi “bidang pengembangan destinasi pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan objek wisata, tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata, dan penyusunan master plan pariwisata. Sebagai salah satu aset daerah yang potensial di bidang pariwisata daerah adalah Sampuraga. Dari penelitian yang dilakukan di tarik kesimpulan:

1. Kabupaten Mandailing Natal memiliki pemanfaatan potensi wisata alam sangat besar karena Mandailing Natal yang luas. Sumberdaya dalam meningkatkan upaya pengembangan wisata Sampuraga di dorong oleh Dinas Pariwisata dan masyarakat sekitar. Dinas Pariwisata dan masyarakat harus bekerjasama dalam meningkatkan pemanfaatan objek wisata Sampuraga agar berjalan baik dan lancar.
2. Pemerintah dalam peningkatan fasilitas yang mencakup kualitas dan kuantitas di sektor pelayanan umum dan kepariwisataan untuk saat ini sedang dilakukan pengembangan sarana dan prasarana. Kualitas sarana,

prasarana dan fasilitas di tempat pariwisata Sampuraga sedang diadakan pembangunan oleh Dinas Pariwisata melalui intruksi Bupati Mandailing Natal. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat menarik menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

3. Untuk mencapai tujuan kegiatan pengembangan wisata melalui promosi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang ada saat ini yaitu melalui media sosial. Namun promosi yang dilakukan masih kurang baik atau belum sempurna, karena ada beberapa hal jangkauan dari promosi belum terlalu luas sehingga promosi yang dilakukan belum maksimal.
4. Kebijakan publik untuk peningkatan SDM untuk pengembangan pariwisata menjadi pengalokasiannilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya terikat dengan objek wisata Sampuraga. Dinas Pariwisata dan pemerintahan daerah memberikan pelatihan kepada pengelola objek wisata untuk mengatasi SDM yang kurang memadai.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dapat lebih memberikan perhatian pada sektor objek wisata Sampuraga, yaitu dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk lebih menunjang keberadaan pariwisata Sampuraga. Pemerintah Mandailing Natal diharapkan juga memiliki uaya-upaya dalam pengelolaan objek wisata Sampuraga, sehingga kedepannya pengembangan objek wisata lebih berkembang dan

memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan masyarakat, misalnya dengan melakukan promosi dalam bidang pariwisata sehingga masyarakat luas lebih mengenal potensi objek wisata Sampuraga. Kepada semua pihak diharapkan agar dapat bekerjasama untuk mendukung objek wisata Sampuraga.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aneta, A. (2010). *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)*. 8, 1–15.
- Arikunto, S. (2014). *Anggaran Perusahaan*. Rineka Cipta.
- Chandler, Ralph C., dan Plano, J. C. (1988). *The Public Administration*. John Wiley & Sons.
- Easton, D. (1963). *The Political System*. Knopf.
- Effendi, S. (2009). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.
- Giantari, B. dan. (2016). *STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA AIR PANAS DI DESA MAROBO, KABUPATEN BOBONARO, TIMOR LESTE*. Universita Udayana.
- Islamy, M. I. (2001). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Sinar Grafika.
- Marpaung, Happy & Bahar, H. (2002). *Pengantar Pariwisata*. Alfabeta.
- Moleong, L. J. 2013. M. P. K. E. R. B. □: P. R. R. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Naditya, D. (2013). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan ...)*. 3, 1–10.
- Nurdin Usman. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo.
- Ridwan, M. (2012). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. SOFMEDIA.
- Samsuridjal, & K. (1997). *Peluang di Bidang Pariwisata*. Mutiara Sumber.
- Sastrayuda, Gumelar, S. (2010). *Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort and Leisure*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Siregar, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kencana.
- Soleh, A. (2017). *Strategi Pengembangan Potensi*. 56(1), 1–9.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes)* (Sutopo (ed.); 9th ed.). Alfabeta.

Wahab, S. A. (2016). *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*. Rineka Cipta.

Wahab, S. A. (2018). *Analisis Kebijaksanaan, dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*. Bumi Aksara.

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo.

## **JURNAL**

Aneta, Asna. 2010. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan

Perkotaan (P2KP) Gorontalo: Jurnal Administrasi Publik

## **SKRIPSI**

Erika, Eria. 2017. Strategi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Dalam Mengembangkan Objek Wisata. Mandailing Natal: Universitas Sumatera Utara.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

## **ACUAN DARI WEBSITE**

Pahompu. 26 Februari 2010 "Pariwisata".  
<http://apakabarsidimpuan.com/2010/02/potensi-wisata-tapsel-dilirik-investor-jepang-as>. Diakses 9 April 2010.



Foto Gapura Objek Wisata Sampuraga



Foto Bersama Pengelola Wisata Sampuraga



Foto Tempat Sungai dan Tempat Istirahat Pengunjung



Foto Wisata Terapi Batu Sampuraga



Foto Tempat Makan Pengunjung



Foto Kubangan Air Panas Wisata Sampuraga



Foto Tempat Makan Pengunjung



Foto Kamar Mandi/Toilet Wisata Sampuraga



Foto Kolam Air Panas Sampuraga





Foto Aula Wisata Sampuraga





Foto Tempat Istirahat Pengunjung Wisata Sampuraga